

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gambaran dari Negara Indonesia adalah merupakan Negara yang berkembang, yang selalu memiliki hubungan antara pusat dengan daerah. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan yang dimaksud di atas adalah pembangunan yang mendukung sektor ekonomi di Kota Yogyakarta, yaitu dalam peningkatan pembangunan hotel sebagai pendorong ekonomi di wilayah Kota Yogyakarta. Melihat fakta pesatnya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, maka dapat di ketahui sebagai upaya peningkatan kedisiplinan dalam proses pemberian izin oleh Dinas Perizinan serta Badan Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta dalam penertiban pembangunan hotel.¹

¹ Data Bappeda, Kota Yogyakarta. Tahun 2010-2011.

Melihat data perkembangan serta pembangunan hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2011, tercatat bahwa ada 25 unit hotel di Kota Yogyakarta ditambah dengan 7 sampai 8 unit pembangunan hotel baru untuk wilayah Kota Yogyakarta. Di antara pembangunan hotel yang sedang melangsungkan proses pembangunan adalah Hotel Ambarukmo dengan 248 kamar, Hotel Aston dengan 200 kamar, dan Hotel Tentram dengan 250 kamar.

Adanya data pembangunan hotel di wilayah Kota Yogyakarta yang sedang berlangsung, menunjukkan bahwa pembangunan hotel di Kota Yogyakarta dalam setiap tahunnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika melihat data pada tahun 2005 kurang dari 20 unit hotel untuk wilayah Kota Yogyakarta dan di tahun 2010-2011 mencapai 25 unit pembangunan hotel dan dengan 7 sampai 8 pembangunan hotel baru untuk wilayah Kota Yogyakarta. Data yang terdapat dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan serta perkembangan yang pesat terhadap operasional pembangunan hotel untuk wilayah Kota Yogyakarta dibandingkan dengan data pembangunan hotel di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Bersamaan dengan adanya pembangunan hotel, maka akan mendorong semakin bertambahnya pemerintah terhadap kebutuhan pemakaian jasa hotel yang akan mendorong para pengusaha khususnya dalam hal ini mengenai operasional pembangunan serta pengelolaan pembangunan hotel yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Dengan banyaknya pihak yang bersangkutan dalam kepentingan pembangunan hotel di wilayah kota Yogyakarta, maka secara

tidak langsung akan mempengaruhi peranan dinas perizinan serta Badan
Perencanaan Daerah dalam pemberian serta pengaturan pembangunan hotel.

Berkaitan dengan pembangunan hotel, maka yang sangat penting di perhatikan oleh pemerintah adalah pelaksanaan pembangunan di setiap daerah, khususnya daerah Kota, Desa dan Kabupaten. Sebab kita lihat sesuai dengan pengumuman dari BAPPENAS bahwa masih banyak desa miskin dan desa tertinggal di seluruh pelosok tanah air apabila pemerintah saat ini lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah khususnya daerah kabupaten maupun kota untuk memacu pembangunan daerah yang masih tertinggal.

Pemerintah juga menyadari hal ini, terbukti dengan program pemerintah yang akhir-akhir ini lebih menitik-beratkan pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten maupun kota sampai dengan pedesaan yang disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, lalu disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sekarang dimutakhirkan dengan keluarnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana melalui Undang-undang tersebut diharapkan bahwa Pemerintahan daerah khususnya pemerintahan Kota dan Kabupaten akan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pemerintahan maupun tugas pelaksanaan pembangunan di segala bidang.²

² DR. M. Solly Lubis SH, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, 1983 Hal. 226.

Terfokus mengenai hubungan antara pembangunan dan kewenangan BAPPEDA di daerah Kota Yogyakarta sebagai program pemerintah pusat maupun daerah, maka sangat penting membicarakan peranan yang dilakukan oleh BAPPEDA sebagai pemberi izin bersama dinas perizinan. Dalam hal ini, Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada daerah tingkat I dan daerah tingkat II di seluruh tanah air.

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah atau perangkat daerah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Oleh karena itu, maka pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan di daerah Kota Yogyakarta sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan otonomi yang seluas-luasnya, yang diteruskan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota. Pada

dasarnya mengenai pengaturan serta perancangan dari Bappeda dalam penulisan ini adalah terfokus pada pembangunan hotel yang ada di Kota Yogyakarta.³

Permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan kewenangan serta pembangunan adalah tentang peranan BAPPEDA Kota Yogyakarta terhadap pembangunan hotel tentram di Kota Yogyakarta. Pada prinsipnya dalam pembangunan hotel memiliki hubungan lokasi, tempat, serta tujuan pembangunan hotel di wilayah Yogyakarta tersebut.

Izin serta pemberian peraturan dalam proses pembangunan hotel di Kota Yogyakarta memiliki peranan yang sangat penting untuk pengaturan serta pelaksanaan atau tujuan terbentuknya pembangunan hotel untuk sarana umum yang dapat mempengaruhi hasil pendapat daerah Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan peran BAPPEDA Kota Yogyakarta, maka diharapkan dapat mengatur serta memberi kewenangan yang sifatnya mengatur dan membangun terhadap program yang direncanakan BAPPEDA Kota Yogyakarta.

Dengan melihat fakta dalam proses pembangunan Hotel Tentram di Kota Yogyakarta sebagai wujud dari program BAPPEDA Kota Yogyakarta, maka hal tersebut akan menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: PERAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA

³ UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam proses pemberian terhadap pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta?
2. Pelaksanaan Serta Proses Pengurusan Perizinan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemberian izin pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap proses pemberian izin pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui proses Pengurusan Perizinan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemberian izin pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis: menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN)
2. Manfaat praktis: mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam realita yang terjadi berkaitan dengan peran dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah terhadap proses perizinan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta.